

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Oleh:

Dr. Henrykus Sihaloho, M. Si

Abstract

The goals of this research were to acquire overview of Regional Domestic Product (GRDP) per capita and to design inclusive and righteous economic growth (growth with equity). Toba Samosir Regency's Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita at Current Market Prices 2000 in 2013 was increasing every year, meanwhile GRDP per capita in 2009-2013 at Constant Market Prices 2000 showed the economic growth increased significantly in Toba Samosir Regency and North Sumatera Province. In order to actualize inclusive and righteous economic growth in Toba Samosir Regency, the government of this regency will have to introduce mina-rice (fish-paddy) programme. Introducing this programme with labor intensive will be potential to increase income and to provide job opportunities labor occasion as well as to decrease overloaded fish nurture. The government of Toba Samosir Regency should invite investors to build some feed industries of corn-soybean meal.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bagi sebuah daerah otonom seperti Kabupaten Toba Samosir keberhasilan pembangunan ekonomi bertumpu pada dua tujuan pokok: memajukan kesejahteraan umum dan membangun secara inklusif dan berkeadilan. Dalam kaitan dengan yang pertama, memajukan kesejahteraan umum identik dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbesar kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi, dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Guna memajukan kesejahteraan umum di atas, seperti dikemukakan, analisis pertumbuhan ekonomi per sektor melalui pengukuran PDRB penting dilakukan. Pengukuran PDRB akan bisa memberi gambaran laju pertumbuhan setiap sektor dan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Selanjutnya, pengukuran PDRB per kapita atas dasar harga berlaku akan menggambarkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan telah ditekankan oleh Sekjen PBB pada sesi pembukaan Konferensi Umum ke-15 United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) di Lima (Peru) yang berlangsung 2-6 Desember 2013. Sebelumnya, sebagaimana dikutip oleh Indrawan (2013), *Asian Development Bank* (ADB) (2010) telah mencanangkan pentingnya kemajuan ekonomi yang dirasakan oleh semua komponen dalam masyarakat dan sekaligus melibatkan mereka dalam proses pencapaiannya. ADB menganggap pentingnya pertumbuhan inklusif dengan berpegang pada dimensi: (i) mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, dan (ii) menjamin akses yang lebih luas terhadap kesempatan ini sehingga anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan. Selanjutnya, Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) ke-45 yang digelar di Manila, Filipina, 2-5 Mei 2012, masih memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui tata pemerintahan dan kemitraan yang baik.

Menurut Indrawan, tingginya angka pertumbuhan ekonomi kita dewasa ini, yang diikuti oleh tingginya angka kesenjangan ekonomi antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, mengisyaratkan pentingnya Indonesia menerapkan konsep pembangunan inklusif. Indrawan menyebutkan, angka kesenjangan ekonomi kita sekarang relatif tinggi (yang tampak dari angka gini ratio yang sebesar 0,41). Ini mengandung arti bahwa agresivitas dunia usaha tidak berdampak kepada tingkat kesejahteraan kolektif masyarakat yang merupakan salah tujuan bernegara.

Tujuan Penelitian

Kabupaten Toba Samosir merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara dan diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999. Sebagai kabupaten yang dimekarkan, Kabupaten Toba Samosir membutuhkan pembangunan di semua sektor. Pembangunan daerah kabupaten ini sebagai bagian integral dari pembangunan provinsi dan pembangunan Nasional berorientasi menumbuhkembangkan sektor ekonomi dan komoditas unggulan daerah atau komoditi yang memiliki potensi perekonomian wilayah tersebut. Dengan pemekaran ini berarti merupakan kesempatan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan seoptimal mungkin potensi dan peluang yang dimiliki guna mendukung pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing tinggi.

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Memperoleh gambaran PDRB per kapita di Kabupaten Toba Samosir; dan
- b. Merancang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Produk Domestik Regional Bruto

Pada hakikatnya pembangunan adalah usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbesar kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi, dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (Badan Pusat Statistik (BPS), 2013). Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung

deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi: PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).
2. Pendekatan Pengeluaran: PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori, dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).
3. Pendekatan Pendapatan: PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Produk Domestik Regional Neto (PDRN) merupakan Produk Domestik Regional Bruto yang dikurangi penyusutan barang-barang modal yang terjadi selama proses produksi atau adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi.

Pendapatan Regional merupakan PDRN dikurangi dengan pendapatan yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam daerah. Ekspor barang dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk daerah dengan penduduk daerah lain.

PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)* sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
 - a. Subsektor Tanaman bahan makanan
 - b. Subsektor Tanaman perkebunan
 - c. Subsektor Peternakan
 - d. Subsektor Kehutanan
 - e. Subsektor Perikanan
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
 - a. Subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - b. Subsektor Pertambangan Bukan Migas
 - c. Subsektor Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan
 - a. Subsektor Industri Migas

- a.1. Pengilangan Minyak Bumi
 - a.2. Gas Alam Cair (LNG)
- b. Subsektor Industri Bukan Migas
- 4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
 - a. Subsektor Listrik
 - b. Subsektor Gas
 - c. Subsektor Air Bersih
- 5. Sektor Konstruksi
- 6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
 - a. Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran
 - b. Subsektor Hotel
 - c. Subsektor Restoran
- 7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
 - a. Subsektor Pengangkutan
 - a.1. Angkutan Rel
 - a.2. Angkutan Jalan Raya
 - a.3. Angkutan Laut
 - a.4. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
 - a.5. Angkutan Udara
 - a.6. Jasa Penunjang Angkutan
 - b. Subsektor Komunikasi
- 8. Sektor Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan
 - a. Subsektor Bank
 - b. Subsektor Lembaga Keuangan Tanpa Bank
 - c. Subsektor Jasa Penunjang Keuangan
 - c. Subsektor Real Estate
 - d. Subsektor Jasa Perusahaan
- 9. Jasa-Jasa
 - a. Subsektor Pemerintahan Umum
 - b. Subsektor Swasta
 - b.1. Jasa Sosial Kemasyarakatan
 - b.2. Jasa Hiburan dan Rekreasi
 - b.3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

Sementara itu, PDRB berdasarkan penggunaan dikelompokkan dalam enam komponen:

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun.
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang pemerintah daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan.
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam daerah dan barang modal bekas atau baru dari luar daerah. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang.
4. Perubahan Inventori. Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya.
5. Ekspor Barang dan Jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga *free on board* (FOB).
6. Impor Barang dan Jasa. Impor barang dinilai menurut *cost insurance freight* (CIF).

Selama ini, data PDRB yang dipublikasikan oleh BPS menggunakan pendekatan produksi (lapangan usaha) dan pendekatan pengeluaran (penggunaan). Pengumpulan data PDRB dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk PDRB sektoral, data dikumpulkan dari departemen/intansi terkait. Data yang dikumpulkan dari setiap sektor antara lain berupa data produksi, data harga di tingkat produsen, dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi, serta data pengeluaran, yang diperoleh baik melalui survei maupun estimasi.
2. Untuk PDRB pengeluaran, data dikumpulkan departemen/intansi terkait yang secara resmi mengeluarkan data (seperti ekspor-impor, pengeluaran, dan investasi pemerintah, serta investasi swasta) dan melalui survei-survei khusus (seperti survei khusus pengeluaran rumah tangga).

Di Indonesia, sejak tahun 2004, data PDRB yang disajikan menggunakan tahun dasar 2000 yang mencakup periode data sejak tahun 2000. Perubahan tahun dasar dari 1993 menjadi 2000 dilakukan karena struktur perekonomian Indonesia dalam kurun waktu tersebut telah mengalami perubahan yang signifikan, meliputi perkembangan harga, cakupan komoditas produksi dan konsumsi serta jenis dan kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan. Pada saat release data PDRB tahunan, data masih bersifat sangat sementara (**). Data berubah menjadi sementara (*) pada tahun berikutnya. Data berubah menjadi final (angka tetap, tanpa tanda bintang) pada tahun ketiga sejak data tersebut dipublikasikan.

Untuk memenuhi kebutuhan data perekonomian regional Kabupaten Toba Samosir, BPS Kabupaten Toba Samosir melakukan penghitungan pendapatan regional secara berkala, di mana dalam publikasi ini digunakan tahun dasar 2000 untuk mencerminkan struktur ekonomi terkini.

PDRB Perkapita

Nilai PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah, walaupun sebenarnya nilai PDRB Perkapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat Kabupaten Toba Samosir. Namun demikian, diharapkan dengan mengamati perkembangan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Toba Samosir.

Tabel 2.1. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2008-2012

Tahun	Toba Samosir		Sumatera Utara	
	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan (%)
2008	15.939,46 ¹⁾	13,30	16.992,65 ¹⁾	16,41
2009	17.701,75 ¹⁾	11,06	18.381,01 ¹⁾	9,31
2010	19.810,46 ¹⁾	11,91	21.108,51 ¹⁾	14,84
2011*)	22.075,08	11,43	23.991,31	13,66
2012**)	25.134,84	13,86	26.568,86	10,74

Keterangan: *) : Angka Sementara

**): Angka Sangat Sementara

¹⁾ : Angka Hasil Sensus Penduduk 2010 dan backcasting tahun 2005 -2009

Sumber: BPS Kabupaten Toba Samosir, 2013

Berdasarkan hasil perhitungan, PDRB Perkapita Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2008 sudah mencapai sebesar 15,94 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya terus meningkat menjadi 17,70 juta rupiah pada tahun 2009, pada tahun 2010 sebesar 19,81 juta rupiah, pada tahun 2011 sebesar 22,08 juta rupiah, dan pada tahun 2012 sudah mencapai 25,13 juta rupiah. Tingginya PDRB Perkapita Toba Samosir tidak terlepas dari keberadaan industri besar yaitu industri pulp yang lokasinya berada di Kabupaten Toba Samosir. Sehingga kondisi ini menegaskan kembali, bahwa keberadaan industri pulp ini memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap perekonomian baik terhadap struktur, laju pertumbuhan ekonomi maupun terhadap PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Toba Samosir.

Jika dibandingkan, angka PDRB Perkapita Kabupaten Toba Samosir dengan Sumatera Utara pada periode tahun 2008-2012, secara umum hampir berimbang, namun sedikit masih lebih rendah dengan angka rata-rata PDRB Perkapita Sumatera Utara khususnya pada tahun 2011 dan tahun 2012 seperti terlihat dalam Tabel 2.1.

METODE DATA

Data yang digunakan untuk memperoleh gambaran terhadap tren pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor dan untuk mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan adalah data PDRB Kabupaten Toba Samosir, PDRB Provinsi Sumatera Utara, PDRB per kapita, dan produktivitas tanaman bahan makanan padi, jagung, kacang tanah, dan umbi-umbian. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 dan 2014 yang meliputi "Statistik Lahan Sawah 2012," "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba Samosir 2008-2012," "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba Samosir 2009-2013," "Toba Samosir Dalam Angka 2013," "Toba Samosir Dalam Angka 2014," "Sumatera Utara Dalam Angka 2013," dan "Sumatera Utara Dalam Angka 2014."

Sebagaimana yang terlihat pada judul, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Toba Samosir. Penetapan lokasi ini dilakukan dengan sengaja. Guna menggambarkan laju pertumbuhan per sektor di daerah Kabupaten Toba Samosir dan identifikasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, maka uraian atas keduanya ini bersifat deskriptif.

Analisis Data

Metode analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk melakukan analisis laju pertumbuhan per sektor di Kabupaten Toba Samosir. Metode analisis LQ menggunakan rumus:

$$LQ = (Vik/Vk) / (Vip/Vp)$$

di mana:

Vik: Nilai output (PDRB) sektor i daerah studi k (kabupaten/kota misalnya) dalam pembentukan Produk Domestik Regional Riil (PDRR) daerah studi k.

Vk: Produk Domestik Regional Bruto total semua sektor di daerah studi k.

Vip: Nilai output (PDRB) sektor i daerah referensi p (provinsi misalnya) dalam pembentukan PDRR daerah referensi p.

Vp: Produk Domestik Regional Bruto total semua sektor di daerah referensi p.

Hasil perhitungan Location Quotient (LQ) akan memberikan gambaran sejauh mana laju pertumbuhan sektor tertentu, misalnya sektor pertanian di daerah kajian (dalam hal ini di Kabupaten Toba Samosir) dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor pertanian di daerah rujukan (dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara). Ada tiga gambaran yang dapat diperoleh dari hasil perhitungan nilai LQ:

1. Nilai LQ di sektor lebih kecil dari 1. Nilai ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah kajian k lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dengan daerah rujukan p . Dengan demikian, sektor i bukan merupakan sektor unggulan daerah kajian k dan bukan merupakan basis ekonomi yang prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah kajian k .
2. Nilai LQ di sektor $i = 1$. Nilai ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah kajian k adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dengan daerah rujukan p ; dan
3. Nilai LQ di sektor lebih besar dari 1. Nilai ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah kajian k lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dengan daerah rujukan p . Dengan demikian, sektor i merupakan sektor unggulan daerah kajian k dan merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k .

Dalam kajian ini, merujuk pada buku "Produk Domestik Bruto Kabupaten Toba Samosir 2009-2013," PDRB dihitung menurut klasifikasi lapangan usaha. Dengan demikian PDRB dalam konteks ini adalah penjumlahan/agregasi dari seluruh nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh setiap kegiatan/lapangan usaha. Dalam penghitungan PDRB ini, seluruh lapangan usaha dikelompokkan menjadi sembilan sektor ekonomi, sesuai dengan pembagian yang digunakan dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional. Pembagian ini sesuai dengan System of National Accounts (SNA). Hal ini juga memudahkan para analis untuk membandingkan PDRB antardaerah. Kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang dimaksud dirinci menjadi: (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik, Gas dan Air Minum, (5) Konstruksi, (6) Perdagangan, Restoran dan Hotel, (7) Pengangkutan dan Komunikasi, (8) Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (9) Jasa-jasa. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah :

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah regional. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. Pendapatan regional (PR) harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu wilayah.
3. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
4. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
5. PDRB dan PR Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PR per kepala atau per satu orang penduduk.
6. PDRB dan PR Perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perihal lokasi dan letak geografis, sejarah singkat, perkembangan aktual sektor pertanian, dan PDRB Kabupaten Toba Samosir tahun 2013 dikutip dari "Toba Samosir dalam Angka 2014" (BPS Kabupaten Toba Samosir, 2014) dengan sedikit perubahan redaksional.

Lokasi dan Keadaan Geografis

Kabupaten Toba Samosir berada pada 2^o03'-2^o40' Lintang Utara dan 98^o56'-99^o40' Bujur Timur. Kabupaten Toba Samosir yang memiliki luas wilayah 202.180 ha ini berada di antara lima kabupaten, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Asahan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Samosir.

Kabupaten Toba Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan ketinggian antara 900-2.200 meter di atas permukaan laut, dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu datar, landai, miring, dan terjal. Struktur tanahnya labil dan berada pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik.

PDRB Kabupaten Toba Samosir

PDRB merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi, dan pergeserannya yang didasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku. Di samping itu PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi baik secara total maupun per sektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000.

PDRB Kabupaten Toba Samosir atas dasar harga berlaku tahun 2013 sebesar 5.010.987,22 juta rupiah. Berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2000, PDRB Kabupaten Toba Samosir tahun 2012 sebesar 2.057.483,38 juta rupiah (mengalami pertumbuhan 5,14 persen dibanding tahun 2011).

Sektor industri merupakan sektor yang memberi peranan atau kontribusi yang terbesar terhadap PDRB tahun 2013. Tahun 2013 sektor ini memberi andil terhadap PDRB sebesar 43,84 persen. Sektor pertanian merupakan sektor yang menunjukkan tren penurunan dalam pembentukan PDRB tahun 2013, hal ini dapat dilihat dari peranannya tahun 2013 sebesar 22,53 persen.

PDRB Perkapita

PDRB dikaitkan dengan jumlah penduduk menggambarkan tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. PDRB perkapita Kabupaten Toba Samosir atas dasar harga berlaku tahun 2013 sebesar 28.242.211 rupiah lebih tinggi bila dibanding tahun 2012 sebesar 24.955.767 rupiah. Berdasarkan atas dasar harga konstan, PDRB per kapita tahun 2013 sebesar 11.596.094 rupiah lebih tinggi dibanding tahun 2012 sebesar 11.110.985 rupiah.

Kesejahteraan masyarakat antara lain dapat dilihat dari angka pertumbuhan PDRB, inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat, dan persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan.

PDRB dan Nilai LQ

Seperti halnya di Kabupaten Toba Samosir, sektor pertanian dan sektor industri

masih merupakan struktur pembentuk PDRB Provinsi Sumatera Utara yang utama Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Tabel 4.1). Namun kedua sektor menyumbang kurang dari setengah PDRB Provinsi Sumatera Utara. Di provinsi ini laju pertumbuhan kedua sektor juga cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Kecuali sektor pertambangan dan penggalian, enam sektor yang lain mengalami peningkatan laju pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Tabel 4.1. Kontribusi PDRB Kabupaten Tobasa dan PDRB Provinsi Sumatera Utara dan Nilai LQ Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 per Sektor

Sektor	2009			2010			2011			2012 ^{*)}			2013 ^{**)}		
	PDRB (%)		LQ	PDRB (%)		LQ	PDRB (%)		LQ	PDRB (%)		LQ	PDRB (%)		LQ
	Toba	SU		Toba	SU		Toba	SU		Toba	SU		Toba	SU	
Pertanian	36,33	23,78	1,53	36,11	23,60	1,53	35,72	23,22	1,54	35,37	22,89	1,55	34,99	22,46	1,56
Industri	34,89	22,39	1,56	34,65	21,97	1,58	34,60	20,97	1,65	34,47	20,46	1,68	34,39	20,08	1,71
Perdagangan, Hotel, Restoran	9,30	18,44	0,50	9,37	18,45	0,51	9,50	18,72	0,51	9,62	18,90	0,51	9,64	19,21	0,50
Jasa-jasa ^{***)}	7,46	10,05	0,74	7,55	10,08	0,75	7,68	10,25	0,75	7,85	10,37	0,76	8,07	10,48	0,77
Konstruksi	4,23	6,77	0,63	4,42	6,79	0,65	4,57	6,92	0,66	4,74	6,95	0,68	4,87	7,03	0,69
Pengangkutan & Komunikasi	3,55	9,53	0,37	3,59	9,79	0,37	3,59	10,11	0,36	3,59	10,31	0,35	3,62	10,46	0,35
Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	2,92	7,12	0,41	2,94	7,40	0,40	2,95	7,89	0,37	2,95	8,26	0,36	2,97	8,44	0,35
Listrik, Gas, dan Air	1,00	0,73	1,37	1,04	0,73	1,42	1,05	0,75	1,40	1,07	0,72	1,49	1,10	0,71	1,55
Pertambangan & Penggalian	0,32	1,19	0,27	0,34	1,18	0,29	0,34	1,18	0,29	0,34	1,13	0,30	0,35	1,13	0,31

Catatan: *) = angka sementara

**) = angka sangat sementara

***) = jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan

Sumber: BPS Kabupaten Toba Samosir (2013, 2014) dan BPS Provinsi Sumatera Utara (2013, 2014) (data diolah)

Dalam hal kontribusi, angka kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran semakin mendekati kontribusi masing-masing sektor pertanian dan sektor industri. Bila kecenderungan ini masih sama, dalam dua tahun ke depan, angka kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran akan melampaui kontribusi sektor pertanian atau sektor industri. Angka kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran bisa jauh meninggalkan kedua sektor ini bila Dinas Pariwisata Kabupaten Toba Samosir bisa memainkan peranan yang berarti dengan menawarkan alternatif obyek dan tempat tujuan wisata (wisata konvensional, ekowisata, wisata rohani, dan wisata kuliner) yang lebih baik, variatif, dan spesifik sehingga bisa mendatangkan turis lokal dan mancanegara. Artinya, peningkatan jumlah turis lokal dan mancanegara akan berkorelasi positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran ini.

Ada hal lain yang menarik pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 ini memperlihatkan, hanya tiga sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari satu, yakni sektor pertanian, sektor industri, dan sektor listrik, gas, dan air. Nilai LQ yang lebih besar dari satu ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ketiga sektor di Kabupaten Toba Samosir lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, ketiga sektor merupakan sektor unggulan Kabupaten Toba Samosir dan merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Berbeda dengan sektor pertanian dan sektor industri yang laju pertumbuhannya meningkat dalam lima tahun terakhir,

laju pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air sempat sedikit menurun antara tahun 2010-2011 (hal ini tampak pada nilai LQ tahun 2010 yang sebesar 1,42 dibanding tahun 2011 yang sebesar 1,40).

Tabel 4.2. Kontribusi PDRB Kabupaten Tobasa dan PDRB Provinsi Sumatera Utara dan Nilai LQ Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Berlaku per Sektor

Sektor	2009			2010			2011			2012 ^{*)}			2013 ^{*)}		
	PDRB (%)		LQ	PDRB (%)		LQ	PDRB (%)		LQ	PDRB (%)		LQ	PDRB (%)		LQ
	Toba	SU		Toba	SU		Toba	SU		Toba	SU		Toba	SU	
Pertanian	42,47	23,03	1,84	42,55	22,90	1,86	43,12	22,48	1,92	43,52	23,03	1,89	43,84	21,32	2,05
Industri	26,38	23,29	1,13	25,47	22,91	1,11	24,47	22,48	1,09	23,44	23,29	1,01	22,53	21,58	1,04
Perdagangan, Hotel, Restoran	9,92	19,01	0,52	10,07	19,05	0,53	10,04	19,21	0,52	10,20	19,09	0,53	10,27	19,29	0,53
Jasa-jasa ^{***)}	7,42	10,45	0,71	7,73	10,80	0,72	7,95	10,92	0,73	8,18	11,13	0,73	8,43	11,51	0,73
Konstruksi	6,15	6,30	0,98	6,58	6,37	1,03	7,01	6,42	1,09	7,41	6,72	1,10	7,76	6,92	1,12
Pengangkutan & Komunikasi	3,19	8,90	0,36	3,17	9,06	0,35	3,08	9,21	0,33	2,99	9,36	0,32	2,95	9,55	0,31
Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	3,01	6,65	0,45	2,94	6,60	0,45	2,87	6,96	0,41	2,81	7,53	0,37	2,77	7,68	0,36
Listrik, Gas, dan Air	1,06	1,37	0,77	1,06	1,37	0,77	1,04	1,38	0,75	1,02	1,32	0,77	1,01	1,30	0,78
Pertambangan & Penggalian	0,41	0,98	0,42	0,43	0,95	0,45	0,44	0,94	0,47	0,44	0,90	0,49	0,44	0,85	0,52

Catatan: *) = angka sementara

**) = angka sangat sementara

***) = jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan

Sumber: BPS Kabupaten Toba Samosir (2013, 2014) dan BPS Provinsi Sumatera Utara (2013, 2014) (data diolah)

Bila atas dasar harga konstan tahun 2000, nilai LQ sektor industri sedikit lebih tinggi dari sektor pertanian, namun dari segi atas dasar harga berlaku, nilai LQ sektor pertanian relatif jauh lebih baik dari sektor industri. Nilai LQ sektor pertanian pada tahun 2013 bahkan hampir mencapai dua kali nilai LQ sektor industri. Angka LQ 2,05 ini bermakna bahwa di Provinsi Sumatera Utara kemampuan sumber daya ekonomi sektor pertanian hampir dua kali lebih baik dari sektor industri.

Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Pentingnya pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan telah ditekankan oleh Sekjen PBB pada sesi pembukaan Konferensi Umum ke-15 United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) di Lima (Peru) yang berlangsung 2-6 Desember 2013. Sebelumnya, sebagaimana dikutip oleh Indrawan (2013), *Asian Development Bank* (ADB) (2010) telah mencanangkan pentingnya kemajuan ekonomi yang dirasakan oleh semua komponen dalam masyarakat dan sekaligus melibatkan mereka dalam proses pencapaiannya. ADB menganggap pentingnya pertumbuhan inklusif dengan berpegang pada dimensi: (i) mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, dan (ii) menjamin akses yang lebih luas terhadap kesempatan ini sehingga anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan. Selanjutnya, Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) ke-45 yang digelar di Manila, Filipina, 2-5 Mei 2012, masih memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui tata pemerintahan dan kemitraan yang lebih baik.

Menurut Indrawan, tingginya angka pertumbuhan ekonomi kita dewasa ini, yang diikuti oleh tingginya angka kesenjangan ekonomi antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, mengisyaratkan pentingnya Indonesia menerapkan konsep pembangunan inklusif.

Indrawan menyebutkan, angka kesenjangan ekonomi kita sekarang relatif tinggi (yang tampak dari angka gini ratio yang sebesar 0,41). Ini mengandung arti bahwa agresivitas dunia usaha tidak berdampak kepada tingkat kesejahteraan kolektif masyarakat yang merupakan salah tujuan bernegara.

ADB (2013) mengatakan, strategi jangka panjang yang bakal didorong lembaga keuangan multilateral tersebut adalah mendukung proyek yang mempromosikan pertumbuhan inklusif, yaitu pertumbuhan yang memiliki basis luas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Direktur untuk Lingkungan dan Perlindungan ADB Nessim Ahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 25 Desember 2013 menyebutkan, "Strategi 2020, kerangka strategis jangka panjang kami, mengenali pentingnya peran lingkungan berkelanjutan dalam mengentaskan kemiskinan dan pertumbuhan yang inklusif" (lihat <http://wartaekonomi.co.id/berita21915/adb-strategi-jangka-panjang-dukung-pertumbuh-an-inklusif.html>).

Pada bagian lain, Warta Ekonomi mengungkapkan, laporan ADB bertajuk "Berinvestasi di Asia-Pasifik" menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 2011-2012, ADB menyetujui proyek bernilai total 43 miliar dolar AS guna membantu menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik sembari memperhatikan dampak sosio-ekonomi dan lingkungan. Pada periode yang sama, ADB juga menyetujui 112 proyek dengan fokus keberlanjutan lingkungan dengan total lebih dari 13 miliar dolar AS termasuk 4,4 miliar dolar AS untuk inisiatif terkait energi bersih guna menyediakan kapasitas energi yang dapat diperbaharui di sepanjang kawasan tersebut.

Dalam laporannya, Warta Ekonomi juga menyebutkan, sebagaimana ADB, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), juga menekankan pentingnya Indonesia memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif guna mengatasi kesenjangan ekonomi yang kian terasa di berbagai daerah. Maxensius Tri Sambodo (Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI) menjelaskan, basis pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah ekonomi yang mengarah kepada pengentasan kemiskinan masyarakat. Menurut Sambodo, pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus dibangun dengan tiga pilar utama, yaitu memaksimalkan kesempatan ekonomi, memberikan jaring pengaman sosial, dan menjamin tersedianya akses yang sama terhadap segenap kesempatan ekonomi. "Ketiga pilar itu perlu mendapat perhatian besar bagi pembangunan ekonomi ke depan." Sambodo menjelaskan, dukungan terhadap perekonomian inklusif akan mengakibatkan pertumbuhan juga menyebar ke berbagai sektor dan tidak hanya pada sektor tertentu. Sambodo mengingatkan, kesenjangan akan makin tinggi bila pertumbuhan ekonomi cenderung ke sektor yang padat kapital dan bukan padat tenaga kerja.

Dalam konteks Kabupaten Toba Samosir, pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan bisa ditempuh dengan mengubah lahan beririgasi desa menjadi lahan beririgasi setengah teknis. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dapat membuat kemajuan ekonomi pertanian di Kabupaten Toba Samosir meningkat dan dirasakan oleh petani melalui peningkatan status lahan sawah beririgasi desa menjadi lahan sawah beririgasi setengah teknis. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir seyogianya mengupayakan hal ini dengan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan mutu lahan sawah yang dimaksud. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir juga dapat mencari peluang mendapatkan bantuan untuk mengubah lahan beririgasi desa menjadi beririgasi setengah teknis dari ADB mengingat bank ini dewasa ini fokus pada pendanaan pembangunan infrastruktur.

Pengubahan ini akan mengatasi masalah penurunan produksi padi akibat kemarau seperti tahun ini dan memungkinkan petani memaksimalkan kesempatan ekonomi, antara lain

dengan menerapkan pola mina-padi. Mengingat mina padi bukan padat modal, introduksi mina padi yang padat tenaga kerja ini berpotensi meningkatkan pendapatan dan membuka kesempatan kerja baru di kabupaten ini. Patut dikemukakan, keberhasilan program ini bagaimana pun tergantung pada faktor keamanan.

Di Kabupaten Toba Samosir lahan sawah beririgasi teknis seluas 25 ha, sisanya terdiri atas lahan beririgasi setengah teknis seluas 11.389,4 ha dan lahan beririgasi desa seluas 11.756,4 ha (BPS, 2014). Lahan sawah beririgasi teknis hanya terdapat di Kecamatan Balige. Mayoritas lahan beririgasi setengah teknis dan beririgasi desa berada di empat kecamatan yang sama. Lahan beririgasi setengah teknis dan beririgasi desa menurut peringkat luas dari yang terluas pertama hingga keempat berada di Kecamatan Porsea 3261,9 dan 3031,2 ha, di Kecamatan Balige 2400,3 ha dan 2693,3 ha, di Kecamatan Silaen 1202,9 ha dan 1828,9 ha, dan di Kecamatan Laguboti 1075,9 dan 1047,9 ha. Menariknya, semua kecamatan di Kabupaten Toba Samosir memiliki lahan sawah beririgasi setengah teknis dan beririgasi desa. Dengan demikian, introduksi mina padi memungkinkan dilakukan di semua kecamatan di Kabupaten Toba Samosir apalagi bila seluruh lahan beririgasi desa dapat diubah menjadi lahan beririgasi setengah teknis. Selain mencanangkan program pengubahan lahan beririgasi desa menjadi lahan beririgasi setengah teknis, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tidak boleh melupakan program pemeliharaan irigasi yang ada.

Patut diketahui, tidak semua lahan sawah di Kabupaten Toba Samosir diusahakan (BPS Kabupaten Toba Samosir, 2013). Berikut ini rincian perihal lahan sawah di Kabupaten Toba Samosir yang dikutip dari "Statistik Lahan Sawah 2012" (BPS Kabupaten Toba Samosir, 2013).

Lahan sawah irigasi yang diusahakan tanaman padi di Kabupaten Toba Samosir selama tahun terakhir ini cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2012 lahan sawah irigasi yang efektif digunakan sebesar 19.635 ha atau mengalami peningkatan sebesar 0,95 persen bila dibandingkan dengan lahan sawah irigasi yang diusahakan tanaman padi pada tahun 2011.

Bila dibandingkan dengan tahun 2012, total lahan sawah irigasi teknis yang diusahakan tanaman padi di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 100 persen. Artinya, seluruh lahan sawah irigasi teknis ada di Kabupaten Toba Samosir seluas 25 ha ditanami padi.

Sementara itu, lahan beririgasi setengah teknis yang diusahakan tanaman padi di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2012 justru mengalami penurunan sebesar 20,83 persen bila dibandingkan dengan tahun 2011. Lahan beririgasi setengah teknis yang diusahakan terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Borbor, Nassau, Pintu Pohan Meranti, Uluan, dan Ajibata. Total luas baku lahan sawah irigasi setengah teknis di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2012 sebesar 6.900 ha, sebesar 35,04 persen berada di 11 kecamatan, yaitu Laguboti, Habinsaran, Parmaksian, Balige, Porsea, Siantar Narumonda, Bonatua Lunasi, Tampahan, Silaen, Parmaksian, dan Sigumpar.

Di Kabupaten Toba Samosir, tidak satu pun lahan sawah nonirigasi yang ditanami padi lebih dari satu kali. Meski ada lahan sawah irigasi yang ditanami padi dua hingga tiga kali setahun, mayoritas lahan sawah yang ditanami padi hanya ditanami satu kali. Sebagai contoh, pada tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 lahan sawah irigasi yang ditanami padi dua kali hanya seluas 4.606 ha, 4.696 ha, 4.192 ha, dan 5.589 ha. Pada saat yang sama, lahan sawah yang ditanami satu kali pada tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 adalah seluas 12.400 ha, 11.913 ha, 11.488 ha, dan 12.826 ha.

Sementara itu, luas lahan sawah yang ditanami tiga kali selama tiga tahun berturut-

turut (2009, 2010, dan 2011) adalah sama (2.589 ha). Sejak tahun 2012, di Kabupaten Toba Samosir ini tidak ada lagi lahan yang ditanami sebanyak tiga kali. Ada indikasi, kasus ini terjadi lantaran total produksinya lebih rendah dari yang ditanami dua kali. Sebagai bukti, lahan sawah irigasi yang ditanami dua kali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara yang ditanami satu kali berfluktuasi. Dari segi ketinggian, lahan sawah irigasi di daerah ini jelas tidak cocok ditanami tiga kali.

Berkaitan dengan introduksi mina padi, ada baiknya Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan lebih dulu melakukan penelitian untuk melihat apakah lebih menguntungkan menerapkan pola mina padi ini di lahan sawah irigasi yang ditanami satu kali atau dua kali. Sebagai acuan, Suherman (2012) menemukan, keuntungan dari mina padi melalui penebaran benih ikan belut 15 hari setelah penanaman padi legowo dengan pemeliharaan selama empat bulan hampir mencapai Rp 10 juta per ha (Rp.8.973.000,-) (lihat <http://gapoktansrirejekiofficial.blogspot.com/2012/06/v-behaviorurldefaultvml.html>), sedangkan penelitian Siadari (2013) menyebutkan, keuntungan rata-rata dari usaha tani mina padi pada masa bera di Desa Totap Majawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun adalah sebesar Rp 9.259.328,-/ha.

Perlu dicatat, program mina padi tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan membuka kesempatan kerja, namun juga dapat mengurangi beban berlebih budidaya ikan di kawasan Danau Toba. Di kemudian hari, keberhasilan program mina padi ini di Kabupaten Toba Samosir dapat menginspirasi daerah lain di seputar Danau Toba untuk melakukan hal serupa.

Besarnya nilai LQ sektor pertanian ini mengisyaratkan, pada tempatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir menggalakkan kemampuan sumber daya ekonomi sektor ini. Apalagi, dengan mengambil contoh enam komoditas tanaman pangan non-hortikultura sebagaimana yang tampak pada Tabel 4.3, produktivitas keenam komoditas dalam kurun waktu 2010-2013 tidak berbeda signifikan, kecuali untuk jagung pada tahun 2010 yang jauh di bawah produktivitas tanaman ini di Sumatera Utara. Bahkan, pada tahun 2013, angka produktivitas untuk semua tanaman contoh sedikit di atas produktivitas keenam tanaman ini di Sumatera Utara. Patut dicatat, kacang hijau tidak pernah diusahakan di Kabupaten Toba Samosir, sedangkan kacang kedelai pernah diusahakan di daerah ini pada tahun 2011 dan 2013 dengan produksi yang sangat minim dari total produksi komoditas ini di Sumatera Utara, yakni masing-masing 1 ton dari 11.426 ton dan 2 ton dari 4.229 ton.

Tabel 4.3. Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Padi, Jagung, Kacang-kacangan, dan Umbi (Kw/Ha) di Toba Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2010-2013

Komoditas	2010		2011		2012		2013	
	Tobasa	Sumut	Tobasa	Sumut	Tobasa	Sumut	Tobasa	Sumut
Padi sawah	52,77	48,73	49,10	48,93	54,22	49,73	58,90	51,21
Padi ladang	37,18	30,56	48,49	30,74	37,76	32,12	34,56	34,31
Jagung	18,97	50,13	51,80	50,71	52,46	55,41	56,54	55,86
Kacang tanah	11,60	11,33	12,24	10,30	16,08	11,89	29,57	12,11
Ubi kayu	126,72	279,48	239,68	287,83	404,45	302,34	327,49	322,06
Ubi jalar	101,73	120,60	121,06	123,56	125,53	127,84	110,29	128,19

Sumber: BPS Kabupaten Toba Samosir (2013, 2014) dan BPS Provinsi Sumatera Utara (2013, 2014) (data diolah)

Khusus menyangkut jagung, luas panen tanaman ini mengalami penurunan selama tiga tahun

terakhir (2011, 2012, dan 2013), yakni masing-masing 4.818 ha, 3.395 ha, dan 2.520 ha, padahal pada kurun waktu yang sama produktivitasnya justru meningkat (Tabel 4.3). Menyangkut kacang tanah, meski produktivitas tanaman ini di Toba Samosir pada tahun 2013 meningkat tajam hingga hampir 83,89 persen dibanding tahun sebelumnya (29,57 kw/ha) (pada tahun yang sama produktivitas tanaman di Sumatera Utara hanya 12,11 kw/ha). Contoh lain yang menarik adalah tanaman ubi kayu. Dalam tiga tahun terakhir (2011, 2012, dan 2013), produktivitas terbaik tanaman ini di Toba Samosir adalah 404,45 kw/ha (tahun 2012), sedangkan di Sumatera Utara adalah 322,06 kw/ha (tahun 2013).

Di luar subsektor tanaman pangan, Kabupaten Toba Samosir merupakan daerah yang cocok untuk pengembangan ternak besar (sapi, sapi perah, kerbau, dan kuda), ternak kecil, dan unggas. Populasi ternak besar yang menonjol adalah sapi dan kerbau (dengan rata-rata populasi 2004-2013 adalah 406.699 ekor dan 180.268 ekor), ternak kecil adalah kambing, domba, dan babi (rata-rata populasi 2004-2013 adalah 714.467 ekor, 323.713 ekor, dan 803.709 ekor), sedangkan populasi unggas (ayam ras petelur dan pedaging) adalah 9.683.474 ekor dan 40.690.227 ekor (BPS Kabupaten Toba Samosir, 2014).

Berkaitan dengan nilai LQ sektor pertanian dan industri yang tinggi, mengingat anjuran ADB mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif, dan berangkat dari fakta produktivitas ketiga jenis tanaman ini yang relatif tinggi, untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dan membuka kesempatan kerja, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dapat mengembangkan industri pengolahan berbahan baku hasil pertanian. Pemerintah kabupaten ini juga dapat mengundang investor untuk mendirikan industri pakan ternak berbasis jagung lokal dan kacang kedelai yang didatangkan dari daerah lain. Pendirian industri pakan ternak bisa berefek ganda lantaran dapat menumbuhkan dan memenuhi kebutuhan pengembangan subsektor pertanian lain (peternakan dan perikanan) dan menggerakkan sektor lain (termasuk sektor pariwisata, antara lain berupa wisata kuliner).

Tidak banyak yang tahu, di luar kawasan Danau Toba, ada banyak obyek wisata. Di Kecamatan Balige saja ada Air Terjun Siboruon, Goa Liang Sipege, dan "Mual Sirambe" yang legendaris sebagai habitat ikan khas Batak yang lazim disebut "ihan," sedangkan di Kecamatan Tampahan ada Kawasan Bukit Singgolom di Desa Lintong Nihuta, Bukit Tarabunga di Desa Tarabunga, Kawasan Pantai Pangkodian di Desa Lintong Nihuta, Kawasan Dolok Sinombah di Desa Tangga Batu Barat, Mual Simataniari di Desa Tangga Batu Barat, Air Terjun Binanga Siporing di Desa Tangga Batu Timur, Air Terjun Sipintu-pintu di Desa Tangga Batu Timur, Gua Sipintu-pintu di Desa Tangga Batu Timur, dan Bukit Sibalihutu di Desa Gurgur Raja. Sepuluh obyek wisata di dua kecamatan ini membuktikan bahwa Kabupaten Toba Samosir memiliki sejumlah obyek wisata yang potensial mengundang turis domestik dan mancanegara. Tentu saja, obyek wisata yang dimaksud membutuhkan dukungan dari dinas-dinas terkait lainnya, termasuk di Dinas PU. Mengingat sektor listrik, gas, dan air termasuk tiga yang sektor yang potensial berkembang di Kabupaten Toba Samosir ($LQ > 1$), Pemerintah Kabupaten perlu mempertimbangkan pemanfaatan sejumlah air terjun sebagai pusat listrik tenaga air.

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan pendapatan regional per kepala mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara itu, nilai PDRB perkapita Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga tahun 2000 menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara secara signifikan.

Tabel 4.4. PDRB Perkapita Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2013

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)		Atas Dasar Harga Konstan (Rp)	
	Toba Samosir	Sumatera Utara	Toba Samosir	Sumatera Utara
2011	22.052.114	23.778.381	10.601.507	9.574.785
2012*)	24.955.767	26.184.746	11.110.985	10.028.302
2013**)	28.242.21	29.722.268	11.596.094	10.488.190

Catatan: *) = angka sementara dan **) = angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten Toba Samosir (2013, 2014) dan BPS Provinsi Sumatera Utara (2013, 2014) (data diolah)

Tabel 4.5. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2011	2012*	20
01. Nias a)	9 794 032	10 775 535	12 187 447
02. Mandailing Natal	10 418 838	11 643 290	13 219 666
03. Tapanuli Selatan	13 399 807	14 833 755	16 550 022
04. Tapanuli Tengah	8 020 490	8 777 140	9 846 097
05. Tapanuli Utara	14 692 361	15 970 560	17 755 285
06. Toba Samosir	22 052 114	24 955 767	28 242 211
07. Labuhanbatu b)	20 041 430	22 040 815	24 497 588
08. Asahan	20 127 633	22 430 374	25 299 321
09. Simalungun	14 071 628	15 686 321	17 529 062
10. Dairi	15 502 978	17 254 559	19 367 097
11. Karo	21 183 934	23 139 082	25 440 787
12. Deli Serdang	24 458 632	26 749 612	30 854 178
13. Langkat	19 974 161	22 431 480	25 264 322
14. Nias Selatan	8 296 801	8 990 138	9 771 060
15. Humbang Hasundutan	15 988 874	17 987 365	20 183 211
16. Pakpak Bharat	8 926 340	9 854 500	10 998 542
17. Samosir	15 191 920	16 607 508	18 299 543
18. Serdang Bedagai	18 217 870	20 480 925	23 252 929
19. Batu Bara	49 684 117	53 990 109	57 211 227
20. Padang Lawas Utara	8 487 325	9 266 670	10 285 985
21. Padang Lawas	7 930 884	8 626 559	9 499 042
22. Labuhanbatu Selatan	24 789 866	27 342 238	30 589 642
23. Labuhanbatu Utara	24 082 333	26 967 991	30 543 882
24. Nias Utara	10 034 573	10 968 554	12 311 351
25. Nias Barat	8 148 368	8 967 766	10 083 011
26. Sibolga	19 951 909	22 041 307	24 774 739
27. Tanjungbalai	21 338 683	22 983 634	24 778 443
73. Pematangsiantar	18 981 676	20 286 468	21 750 775
74. Tebing Tinggi	17 603 851	19 696 039	22 636 619
75. Medan	43 932 544	48 908 864	55 151 219
76. Binjai	22 723 829	25 904 991	28 792 287
77. Padangsidempuan	11 749 507	12 834 953	14 109 915
78. Gunungsitoli	17 930 540	19 495 782	22 110 915
SUMATERA	23 778 381	26 184 746	29 722 268

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara; Keterangan: *) Angka sementara **) Angka sangat

sementara; a)= Tahun 2009 PDRB Kab. Nias Sudah Terpisah dari PDRB Kab. Nias Utara, Nias Barat ,dan Kota Gunungsitoli; dan b)= Tahun 2009 PDRB Labuhanbatu Sudah Terpisah dari PDRB Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara

Tabel 4.6. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2011	2012*	2013**
01. Nias a)	4 111 318	4 337 818	4 587 471
02. Mandailing Natal	5 252 872	5 520 939	5 806 692
03. Tapanuli Selatan	7 072 708	7 419 533	7 743 887
04. Tapanuli Tengah	3 971 424	4 127 147	4 312 886
05. Tapanuli Utara	6 020 912	6 315 774	6 637 434
06. Toba Samosir	10 601 507	11 110 985	11 596 094
07. Labuhanbatu b)	8 082 300	8 399 543	8 722 119
08. Asahan	8 374 590	8 746 168	9 159 762
09. Simalungun	7 133 594	7 511 758	7 791 888
10. Dairi	7 919 187	8 301 057	8 697 133
11. Karo	9 959 126	10 374 784	10 646 492
12. Deli Serdang	8 340 990	8 615 894	9 488 691
13. Langkat	7 786 401	8 154 981	8 552 669
14. Nias Selatan	4 369 989	4 567 083	4 744 116
15. Humbang Hasundutan	6 106 829	6 394 041	6 695 767
16. Pakpak Bharat	4 179 669	4 341 417	4 499 022
17. Samosir	9 283 833	9 782 598	10 343 564
18. Serdang Bedagai	8 056 858	8 503 335	8 970 803
19. Batu Bara	20 328 857	20 948 127	21 392 243
20. Padang Lawas Utara	3 628 983	3 769 070	3 907 699
21. Padang Lawas	3 421 832	3 540 694	3 665 529
22. Labuhanbatu Selatan	10 505 068	10 899 276	11 296 408
23. Labuhanbatu Utara	9 995 931	10 511 141	11 053 379
24. Nias Utara	4 056 925	4 251 354	4 474 675
25. Nias Barat	3 283 721	3 417 124	3 595 871
26. Sibolga	9 136 871	9 581 651	10 102 079
27. Tanjungbalai	9 286 912	9 609 574	9 892 215
28. Pematangsiantar	9 082 488	9 504 605	9 896 931
29. Tebing Tinggi	8 390 824	8 819 493	9 299 796
30. Medan	18 132 966	19 319 273	19 949 516
31. Binjai	8 560 429	8 973 884	9 402 747
32. Padangsidempuan	5 054 245	5 275 126	5 503 751
33. Gunungsitoli	7 186 035	7 530 727	7 892 374
SUMATERA UTARA	9 574 785	10 028 302	10 488 190

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara; Keterangan: *) Angka sementara **) Angka sangat sementara; a)= Tahun 2009 PDRB Kab. Nias Sudah Terpisah dari PDRB Kab. Nias Utara, Nias Barat ,dan Kota Gunungsitoli; dan b)= Tahun 2009 PDRB Labuhanbatu Sudah Terpisah dari PDRB Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara

Bila dibandingkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan atas harga dasar harga konstan antara Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara, angka PDRB keduanya tidak berbeda jauh. Berbeda halnya bila PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan atas harga dasar harga konstan antara Kabupaten Toba Samosir dibandingkan dengan Kabupaten Batubara dan Kota Medan yang masing-masing menempati urutan pertama dan kedua (lihat Tabel 4.5 dan Tabel 4.6). Bahkan, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Batubara lebih dari dua kali Kabupaten Toba Samosir dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan Kabupaten Batubara hampir dua kali Kabupaten Toba Samosir. Dengan demikian, pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Batubara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun lebih dari dua kali Kabupaten Toba Samosir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Di Kabupaten Toba Samosir ada tiga sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari satu, yakni sektor pertanian, sektor industri, dan sektor listrik, gas, dan air. Nilai LQ yang lebih besar dari satu ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ketiga sektor di Kabupaten Toba Samosir lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Sumatera Utara.
2. Nilai LQ sektor pertanian pada tahun 2013 hampir mencapai dua kali nilai LQ sektor industri. Angka ini bermakna bahwa di Provinsi Sumatera Utara kemampuan sumber daya ekonomi sektor pertanian hampir dua kali lebih baik dari sektor industri.
3. PDRB perkapita Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013 atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan pendapatan regional perkapita mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara itu, nilai PDRB perkapita Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013 atas dasar harga konstan tahun 2000 menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk Kabupaten Toba Samosir dan Provinsi Sumatera Utara secara signifikan.
4. Mengingat mina padi bukan padat modal, introduksi mina padi yang padat tenaga kerja ini berpotensi meningkatkan pendapatan dan membuka kesempatan kerja baru di Kabupaten Toba Samosir.
5. Program mina padi tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan membuka kesempatan kerja, namun juga dapat mengurangi beban berlebih budidaya ikan di kawasan Danau Toba.
6. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir seyogianya mengundang investor untuk mendirikan industri pakan ternak berbasis jagung lokal dan kacang kedelai yang didatangkan dari daerah lain. Pendirian industri pakan ternak bisa berefek ganda lantaran dapat menumbuhkan dan memenuhi kebutuhan pengembangan subsektor pertanian lain (peternakan dan perikanan) dan menggerakkan sektor lain (termasuk sektor pariwisata, antara lain berupa wisata kuliner).

Saran

1. Angka kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran bisa jauh meninggalkan sektor pertanian dan sektor industri. Untuk itu disarankan agar Dinas Pariwisata Kabupaten Toba Samosir bisa memainkan peranan yang berarti dengan menawarkan alternatif obyek dan tempat tujuan wisata (wisata konvensional, ekowisata, wisata rohani, dan wisata kuliner) yang lebih baik, variatif, dan spesifik sehingga bisa mendatangkan turis lokal dan mancanegara. Artinya, peningkatan jumlah turis lokal dan mancanegara akan berkorelasi positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran ini.
2. Sektor pertanian, sektor industri, dan sektor listrik, gas, dan air merupakan sektor unggulan Kabupaten Toba Samosir. Karena itu pada tempatnya Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menjadikan ketiga sektor basis ekonomi dan mengembangkannya lebih lanjut.
3. Besarnya nilai LQ sektor pertanian ini mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir menggalakkan kemampuan sumber daya ekonomi sektor ini.
4. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dapat membuat kemajuan ekonomi pertanian di Kabupaten Toba Samosir meningkat dan dirasakan oleh petani melalui peningkatan status lahan sawah desa menjadi lahan sawah beririgasi setengah teknis dengan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan mutu lahan sawah yang dimaksud. Perubahan ini akan mengatasi masalah penurunan produksi padi akibat kemarau

- seperti tahun ini dan memungkinkan petani memaksimalkan kesempatan ekonomi, antara lain dengan menerapkan pola mina-padi.
5. Berkaitan dengan introduksi mina padi, ada baiknya Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan lebih dulu melakukan penelitian untuk melihat apakah lebih menguntungkan menerapkan pola mina padi ini di lahan sawah irigasi yang ditanami satu kali atau dua kali.
 6. Berkaitan dengan nilai LQ sektor pertanian dan industri yang tinggi, mengingat anjuran ADB mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif, dan berangkat dari fakta produktivitas tanaman jagung, kacang tanah, dan ubi kayu yang relatif tinggi, untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dan membuka kesempatan kerja, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sudah saatnya mengembangkan industri pengolahan berbahan baku hasil pertanian. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir pun dapat mengundang investor untuk mendirikan industri pakan ternak berbasis jagung dan kacang kedelai yang didatangkan dari daerah lain.
 7. Dalam hal pendanaan perbaikan infrastruktur irigasi, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, selain mengajukan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan mutu lahan sawah yang dimaksud. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir juga dapat mencari peluang mendapatkan bantuan untuk mengubah lahan beririgasi desa menjadi beririgasi setengah teknis dari ADB mengingat bank ini dewasa ini fokus pada pendanaan pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. 2013. *Statistik Lahan Sawah 2012*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. Balige.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba Samosir 2008-2012*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. Balige.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba Samosir 2009-2013*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. Balige.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. 2013. *Toba Samosir Dalam Angka 2013*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. Balige.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. 2013. *Toba Samosir Dalam Angka 2013*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. Balige.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2013. *Sumatera Utara Dalam Angka 2013*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Medan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2014. *Sumatera Utara Dalam Angka 2014*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Medan.
- <http://gapoktansrirejekiofficial.blogspot.com/2012/06/v-behaviorurldefaultvml.html>.
- <http://wartaekonomi.co.id/berita21915/adb-strategi-jangka-panjang-dukung-pertumbuhan-inklusif.html>).
- Siadari, Maraden. 2013. "Penggunaan lahan pada masa bera padi untuk peningkatan pendapatan petani padi sawah Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun." Skripsi. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Medan.